

**FAKTOR KETERGANTUNGAN DALAM HUBUNGAN
TIONGKOK DAN SUDAN TAHUN 2005-2014**

SKRIPSI



*Disetujui untuk Sidang
21 Januari 2021*



Disusun Oleh:

Cindy Juliana

17323064

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**FAKTOR KETERGANTUNGAN DALAM HUBUNGAN
TIONGKOK DAN SUDAN TAHUN 2005-2014**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi
dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Guna Memenuhi
Sebagian Syarat Memperoleh Derajat S1 Hubungan Internasional



Disusun Oleh:

Cindy Juliana

17323064

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**FAKTOR KETERGANTUNGAN DALAM HUBUNGAN
TIONGKOK DAN SUDAN TAHUN 2005-2014**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

2 Februari 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia


Ketua Program Studi

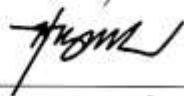
(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

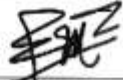
Dewan Penguji:

1. Masitoh Nur Rohma, S. Hub.Int., M.A.
2. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A
3. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A

Tanda Tangan







PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Cindy Juliana
No. Mahasiswa : 17323064
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Faktor Ketergantungan dalam Hubungan Tiongkok dan Sudan Tahun 2005-2014.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan Tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara menyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 5 Februari 2021


Cindy Juliana

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil"alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat dan semangat yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas doa, nasehat dan bantuan yang telah diberikan selama ini

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2017

Terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan bersama

selama kuliah di HI UII

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”

(Q.S Al-Baqarah Ayat 286)



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah subhanallahu wa ta'allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan dukungan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada bagi penulis
2. Kepada keluarga saya, khususnya ibu, ayah, dan kakak saya. Mereka selalu memberikan dukungan penuh untuk saya. Mereka tanpa henti mengatakan jika saya harus lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka selalu memberikan kasih sayang, cintanya untuk saya, dan mempercayai saya untuk belajar dan berproses di kuliah di Universitas Islam Indonesia ini untuk bisa mencari lingkungan yang baik pastinya. Terima kasih untuk setiap pengorbanan dan keringat yang kalian

berikan. Semoga ayah, ibu, dan kakak selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT.

3. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D.
4. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, waktu serta pikirannya dalam penyelesaian skripsi ini. Saya sangat bersyukur mendapatkan Dosen Pembimbing yang sangat sabar membimbing saya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih untuk selalu membimbing dan mau merelakan waktunya untuk terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini. Saya memohon maaf untuk waktu yang melelahkan dan tersita selama dalam proses penulisan skripsi ini Miss. Semoga Miss selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan dari Allah SWT.
7. Seluruh dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk ilmu dan pelajaran yang telah diberikan.
8. Raditya Septian Perdana yang telah menjadi sahabat saya, dan Partner segala hal. Terima kasih sudah mau menjadi sahabat, kakak, dan

keluarga bagi saya selama saya disini. Terima kasih untuk waktu, saran, dan bahu untuk setiap keluh kesah yang saya bagi ke kamu. Semangat menyusul dan ciptakan impian yang kamu mau, Dit. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan, dan selalu dilindungi oleh Allah SWT.

9. Semua yang ada di rumah Dayu Permai. Terima kasih untuk Bunda, Rayhan, Deo, Dovan, Defri, Kak Angel, Nanda, Yoma yang selalu memberikan dukungan dan menjadi partner 24/7 sebagai pejuang skripsi dan menjadi sahabat serta keluarga baru saya. Tanpa kalian aku bukan apa-apa.
10. Indri Indah F, Ajeng Mawarningtyas, Mutia Ramadhani, Nanda Rizky. Sahabat awal semesterku. Terima kasih banyak kalian selalu ada untuk memberikan dukungan, pengalaman hidup, bahu ketika saya selalu merasa semua tidak adil, terima kasih kalian mau susah payah mendengarkan keluh kesah dan sangat berperan penting dalam pembuatan skripsi ini. Saya berdoa untuk kalian semoga kita selalu bisa bersama dan bisa mewujudkan semua yang kita inginkan. Sekali lagi terima kasih banyak.
11. Terima kasih untuk Nadyya dan Aulia yang mau membantu dalam pembuatan Skripsi ini. Terima kasih teman hebatku.
12. Mona, Ici, Gita, Lia, Mike. Semangat untuk kalian sahabat, terima kasih kalian memberikan dukungan untuk saya.
13. Teruntuk kamu Mr. I terima kasih banyak, karna kamu saya bisa melewati hari saya dengan suka cita, saya banyak belajar dan bersyukur

akan drama yang telah saya lewati tanpa kamu. saya berharap kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bijak dalam mengambil keputusan.

14. Semua pihak yang turut membantu penulis baik dalam bentuk doa, bantuan materi, nasihat, dukungan serta dukungan moril kepada penulis.



ABSTRAK [MOU1]

Perkembangan industrialisasi yang ada di Tiongkok mengakibatkan Tiongkok sangat bergantung pada sumber minyak yang ada untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Oleh karena itu, Tiongkok menjadi salah satu negara yang berhasil menaklukkan negara-negara di kawasan Afrika untuk mencari sumber minyak yang ada disana. Tiongkok memilih Sudan Sebagai rekan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan domestik negaranya dan Sudan juga membutuhkan bantuan dari negara lain untuk keberlangsungan negaranya. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana faktor ketergantungan yang dilakukan oleh Tiongkok dan Sudan sebagai partner kerja sama. Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang ada. Penulis menggunakan teori interdependensi sebagai landasan untuk memperkuat argumen. Dalam penelitian ini ada dua poin penting dalam teori interdependensi yaitu ketergantungan dan aktor. Ketergantungan merupakan satu media yang tidak bisa lepas dari media lainnya. Sedangkan aktor adalah penggerak rakyat untuk mematuhi undang-undang yang ada di negara tersebut.

Kata-kata kunci: Hubungan Tiongkok dan Sudan, teori interdependensi, kerja sama, aktor, ketergantungan.

ABSTRACT

The development with China's industry has resulted on China dependents toward Oil to satisfy their domestic needs. Thus, China become one of the country who puts their intentions to Africa and succeeded to conquer African's natural resource. Tiongkok made a strategic partnership with Sudan to satisfy both countries' domestic needs. This study seeks to explain dependency factors involved on their partnership and this paper made to answer another questions given. Author use Interdependence Theory to answer all the questions and will use 2 main points within which are Dependency and Actor. Interdependency is a media which could not be separated with another media. Meanwhile Actor is a state which drive their people to follow any law within their region.

Keywords: China and Sudan relations, interdependence theory, cooperation, actors, dependence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ETIKA AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Signifikansi.....	6
1.5. Cakupan Penelitian.....	6
1.6. Tinjauan Pustaka	7
1.7. Landasan Teori/Konsep/Model	11 12
1.8. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Subjek dan Objek Penelitian	14
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Proses Penelitian.....	15
BAB II KONDISI DOMESTIK DAN DINAMIKA KERJA SAMA	16 17
2.1. Kondisi Domestik Tiongkok dan Sudan	16 17
2.2. Dinamika Hubungan Kerja Sama Tiongkok-Sudan	21 22
BAB III FAKTOR KETERGANTUNGAN TIONGKOK-SUDAN.....	29 30
3.1. Tiongkok dan Sudan Sebagai Aktor Negara Menciptakan ketergantungan dalam Kerja Sama	29 30

3.2. Ketergantungan Tiongkok dan Sudan untuk Memenuhi National Interest	36
BAB IV KESIMPULAN	47
DAFTAR PUSTAKA	51



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. : Kerja Sama Tiongkok-Sudan Tahun 2005-2014	31
--	----



DAFTAR SINGKATAN

SMLM-OI	: <i>Gerakan-dalam-Oposisi Pembebasan Rakyat Sudan</i>
IGO	: <i>International Governmental Organizations</i>
NGO	: <i>International Non-Governmental Organizations</i>
TNC	: <i>Transnational Companies</i>
SLM	: <i>Sudan Liberation Movement</i>
DLF	: <i>Darfur Liberation Front</i>
JEM	: <i>Justice and Equality Movement</i>
GNPOC	: <i>Greater Nile Petroleum Operating Company</i>
PRC	: <i>People's Republik of China</i>
CNPC	: <i>China National Petroleum Corporation</i>

BAB I

PENDAHULUAN [MOU2]

1.1. Latar Belakang [MOU3]

Tiongkok sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat setiap tahunnya membuat negara ini harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan energinya. Oleh karena itu wajar jika Tiongkok melakukan ekspansi ke negara-negara penghasil minyak yang ada di dunia dikarenakan melonjaknya kebutuhan domestik maupun luar negaranya. Tiongkok awalnya melakukan pencarian minyak di berbagai negara-negara Timur Tengah kemudian berpindah haluan ke negara-negara Afrika (Coal, 2014). Tiongkok yang merupakan negara dengan kebutuhan energi tertinggi dan negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat berpengaruh Tiongkok melakukan banyak kerja sama dengan negara yang ada di dunia. Kehadiran Tiongkok di Sudan diawali dengan kehadiran Tiongkok di Afrika dan kerja sama yang dilakukan Tiongkok menyempurnakan hubungannya secara resmi dengan Afrika dengan adanya kunjungan Hu Jintao ke beberapa kota yang ada di Afrika salah satunya yaitu Sudan. Banyak upaya yang dilakukan Tiongkok dengan Afrika di antaranya adalah menetapkan dana pembangunan Tiongkok-Afrika senilai US\$5 miliar untuk mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok menanam modal di Afrika, menyediakan pinjaman profesional US\$2 miliar bagi Afrika selama tiga tahun kedepan, menghapus hutang negara-negara Afrika paling terlilit hutang dan paling terbelakang dalam bentuk utang pemerintah bebas bunga yang jatuh tempo pada akhir 2005, dan dalam 3 tahun berikutnya melatih 15.000

profesional Afrika, mengirim 100 ahli pertanian ke Afrika, membangun 30 rumah sakit dan 100 sekolah pedesaan, dan menambah jumlah beasiswa Pemerintah Afrika dari 2000 orang menjadi 4000 orang per tahun 2009.

Sudan sebagai negara baru berdiri, harus menghadapi permasalahan-permasalahan dari konflik sipil yang terjadi disana. Ada dua permasalahan yang menyebabkan adanya konflik Sudan. Ada yang memihak kepada pemerintah ada juga yang mendukung pemberontakan. Kemunculan pemberontakan ini didasari oleh kekecewaan dari beberapa etnis yang diperlakukan tidak adil dalam pemerintah. Adanya penuduhan terhadap korupsi serta belum stabilnya perekonomian di Sudan mengakibatkan munculnya aksi pemberontakan yang dilakukan oleh *Gerakan-dalam-Oposisi Pembebasan Rakyat Sudan* disingkat menjadi *SPLM-OI* (Putri, 2019). Adanya konflik ini kemudian membawa banyak kerugian baik itu dari segi keamanan, regional, ekonomi, dan sosial penduduk sudan selatan. Konflik ini juga membawa kekhawatiran negara-negara yang tergabung dalam Uni Afrika. Dikarenakan banyaknya penduduk Sudan Selatan yang mencari suaka ke negara tetangga yang kemudian mengganggu keamanan regional (Putri, 2019).

Akibat adanya konflik sipil yang berlangsung di Sudan Selatan mengakibatkan Sudan kesulitan mendapatkan bantuan dari negara lain (Minchah N. , 2016). Sudan menerima bantuan dari Tiongkok, dan menjadi salah satu negara yang beruntung dapat menerima bantuan dari negara Tiongkok. Sudan menjadi salah satu negara di benua Afrika yang menggantungkan diri pada bantuan Tiongkok sebesar 50% dari devisa perkapita Sudan per tahun (Francis,

2012) Bantuan tersebut digunakan untuk bantuan kemanusiaan dan berupa pinjaman luar negeri. Kemudian ketidakstabilan ekonomi yang ada akibat konflik sipil ini mengakibatkan Sudan benar-benar bergantung kepada Tiongkok. Ketika kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011 yang tidak lepas dari intervensi Amerika Serikat, hubungan antara Sudan, dan Sudan Selatan mengalami ketegangan dan berujung pada perang saudara. Perang yang berlangsung tersebut terjadi di daerah perbatasan antara Sudan, dan Sudan Selatan. Sudan Selatan memblokir wilayah Heglig yang merupakan ladang minyak dan sumber utama devisa negara dari sektor perekonomian bagi kedua negara (Hale, 2013)

Secara geografis Heglig terletak di Sudan Selatan, akan tetapi secara internasional diakui sebagai wilayah dari Sudan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan respon atas tindakan Sudan Selatan melalui Sekretaris Jenderal PBB yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sudan Selatan merupakan sebuah tindakan ilegal serta menghimbau Sudan Selatan untuk menarik mundur pasukannya supaya tidak tercipta konflik baru di kawasan tersebut, yang disebabkan adanya perebutan ladang minyak yang terjadi di kawasan tersebut (Rahmayeni, 2014). Tiongkok membela Sudan di sidang PBB yang didukung juga oleh Rusia akibat konflik tersebut. Tiongkok juga menjadi penghambat penjatuhan sanksi dari PBB kepada Sudan yang diusung oleh Amerika Serikat karena Tiongkok menentang penjatuhan sanksi tersebut. Tiongkok selama ini melindungi Sudan di PBB dan menentang segala bentuk penjatuhan sanksi dari PBB ke Sudan. Banyak hambatan dari negara-negara barat untuk melakukan kerja sama dengan Sudan, akan tetapi berbanding terbalik dengan Tiongkok, Tiongkok melakukan kerja sama

yang baik dengan Sudan tanpa hambatan. Kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Sudan ini memberikan dampak yang baik di masing-masing negara (Arms, 2007).

Tiongkok menawarkan karakter investasi yang murah, cepat, dan efektif dibandingkan dengan negara-negara Barat. Hal tersebut menjadikan Tiongkok sebagai pendonor utama di Sudan. Tiongkok meningkatkan bantuan luar negerinya kepada Sudan yang berfokus pada bantuan pembangunan ekonomi yang juga termasuk peningkatan 6 infrastruktur. Peningkatan ini ditandai dengan perjanjian *Economic, Trade and Technical Cooperation*. Tingginya bantuan Tiongkok ke Sudan dilihat dari bantuan pembangunan infrastruktur minyak. Hal tersebut dikarenakan banyaknya sumber daya alam seperti minyak yang dimiliki oleh Sudan. Tiongkok melihat adanya potensi minyak yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Sudan dengan adanya pengolahan minyak yang baik. Tiongkok juga memberikan bantuan infrastruktur penyulingan minyak. Karena sudah memiliki sumber daya energi minyak yang kaya, dengan adanya bantuan infrastruktur penyulingan minyak ini berdampak positif kepada Sudan. Mulai stabilnya perekonomian yang ada di Sudan (Nasution, 2019).

Keterlibatan Tiongkok di Sudan kemudian menjadi perhatian dunia internasional karena kebijakan non-interferensi Tiongkok dianggap tidak memedulikan permasalahan yang terjadi di Sudan seperti pelanggaran hak asasi manusia di dalam konflik Sudan Selatan, yang terlihat dari penolakan Beijing untuk menurunkan penjaga perdamaian di Darfur, namun dengan cepat menurunkan 400 pasukannya untuk menjaga sumur minyaknya di Sudan ketika situasi politik dan

keamanan semakin mengancam sumur minyak Tiongkok di Sudan (Setiawan, 2014). Tiongkok memberikan pinjaman kepada Sudan dan memberikan suplai senjata untuk dikirim ke Sudan dan Tiongkok meminta bayaran dengan mengambil minyak mentah Sudan. Selama perang sipil tersebut berlangsung, Tiongkok merupakan pemasok utama persenjataan untuk militer Sudan termasuk amunisi persenjataan, helikopter, pesawat tempur, tank T-59, senjata antipesawat kaliber 37 mm dan howitzer kaliber 12mm, dan 220 truk (Setiawan, 2014). Persenjataan yang diperoleh pemerintahan Sudan dari Tiongkok bukanlah hal yang baru, karena pada saat pemerintah Jafar Nimeiry (1965-1985) Sudan juga membeli persenjataan di negara Tiongkok tersebut (Rahmayeni, 2014).Awalnya bantuan yang diberikan Tiongkok kepada Sudan memberikan dampak yang baik, akan tetapi setelah dilihat kembali, motif dari kerja sama ini malah menimbulkan konflik baru. Tiongkok bukan hanya memberikan masalah baru bagi Sudan, akan tetapi juga pada masyarakat internasional.

1.2. Rumusan Masalah [MOU4]

Bagaimana ketergantungan Tiongkok-Sudan dapat memengaruhi keberlangsungan kerja sama keduanya tahun 2005-2014 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis faktor ketergantungan dalam hubungan Tiongkok dan Sudan tahun 2005-2014.

2. Untuk menganalisis bagaimana ketergantungan dua negara dapat memengaruhi keberlangsungan kerja sama antara Tiongkok dan Sudan 2005-2014.
3. Untuk menganalisis bagaimana hubungan diplomatik yang dijalankan Tiongkok dan Sudan pada tahun 2005-2014.

1.4. Signifikansi

Penelitian ini penting karena keinginan penulis terkait campur tangan Tiongkok dalam konflik yang ada di Sudan. Sudan negara kaya akan minyaknya selalu diincar oleh negara-negara yang memiliki power yang besar termasuk Tiongkok. Tiongkok mencari cela untuk dapat memenuhi kebutuhan energi baik itu secara domestik maupun untuk kebutuhan luar negeri. Terlebih Tiongkok melihat bahwa negara-negara Barat yang enggan bekerja sama dengan Sudan, hal ini menjadi salah satu pertimbangan Tiongkok untuk bekerja sama dengan Sudan. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana Tiongkok yang memperkeruh suasana konflik Sudan akibat kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara dan bagaimana cara Tiongkok kemudian memanfaatkan kondisi perang yang terjadi di Sudan menghasilkan banyak peluang untuk mendapatkan sumber minyak yang ada di Sudan.

1.5. Cakupan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada satu negara utama yang akan ditonjolkan, yaitu Tiongkok. walaupun ada negara lain seperti Sudan yang akan dijadikan sebagai

negara pendamping yang juga penting dalam penelitian ini. Tiongkok memiliki strategi untuk mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi di Sudan. Penelitian ini berfokus pada tahun 2005-2014, pada tahun 2005-2014 kerja sama yang dilakukan antar keduanya mengalami dinamika yang naik turun dalam menjalin hubungan bilateralnya. Terdapat hambatan juga peningkatan secara signifikan dari kerja sama yang dilakukan antara Tiongkok dan Sudan. [CJ5]

1.6. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa perbedaan mengenai kerja sama yang dilakukan Tiongkok dan Sudan. Menurut (Large, 2009), baru-baru ini hubungan antara Tiongkok dan Sudan cenderung memberikan *privilege* pada diplomasi internasional Beijing atas Darfur. Adanya kerja sama ini juga dipengaruhi oleh persaingan *geostrategic* untuk melawan Amerika Serikat, yang menekankan pada persaingan ekonomi dan politik kekuasaan. Tiongkok memiliki strategi sendiri agar negaranya menjadi negara yang memiliki kekuasaan yang besar untuk bisa menandingi lainnya dengan memanfaatkan elit penguasa. Adanya dukungan yang diberikan oleh Tiongkok kepada Sudan dipandang positif untuk memperlihatkan peningkatan perdagangan dan ekonomi untuk mencapai perdamaian yang ada di Sudan. Keterlibatan Tiongkok di Sudan kemudian berkembang dan memengaruhi perpolitikan Sudan (Large, 2009).

Dukungan yang memperlihatkan bantuan terhadap Sudan kemudian dikuatkan secara tegas oleh Liu Hui dalam penelitiannya, Tiongkok dan Sudan yang sama-sama masih menjadi negara berkembang memiliki keistimewaan dalam menaikan

pertumbuhan ekonominya. Pemerintah Tiongkok telah membantu Sudan mengembangkan industri dasar. Tiongkok menyediakan pinjaman jangka panjang tanpa bunga untuk infrastruktur Sudan seperti jalan, jembatan. Dari 1981 hingga Agustus 2000, kontrak kerja sama antara Tiongkok dan Sudan telah mencapai 702 item. Tiongkok telah membantu masyarakat dan perekonomian Sudan. Sudan memiliki banyak kekayaan dan menjadi mitra bisnis yang sangat menguntungkan bagi Tiongkok (Hui, 2015).

Hubungan antara Tiongkok dan Sudan sangat mengedepankan sektor ekonomi menurut analisis Xinhua. Hubungan Tiongkok-Sudan telah menjadi model bagi kerja sama Tiongkok dan Sudan selama 58 tahun sejak pendirian mereka, pihak telah menyatakan keinginan untuk meningkatkan hubungan mereka dan menciptakan dorongan baru untuk memperkuat kerja sama ekonomi. Sudan berterima kasih kepada Tiongkok karena memberikannya bantuan yang berharga sebagai mitra strategis ketika Sudan berada di bawah otorita Tiongkok sepenuhnya. Pemerintah Sudan menantikan kunjungan Wakil Perdana Menteri China Zhang Gaoli ke Khartoum pada 25 Agustus. Pertukaran kunjungan oleh para pejabat dari kedua belah pihak dan pendirian proyek bersama tetap menjadi sarana yang benar-benar diadili untuk meningkatkan ikatan historis, dan memperdalam rasa saling menghormati (Xinhua, 2017).

Ada dua alasan utama mengapa Sudan membutuhkan bantuan Tiongkok. Alasan pertama adalah bahwa Tiongkok dan Sudan memiliki kesamaan yaitu minyak. Tiongkok membutuhkan minyak untuk ekonominya yang sedang booming, dan bersedia menawarkan bantuan secara finansial ke Sudan. Tiongkok

membantu dan mengambil risiko yang sangat sangat tidak stabil di Sudan dikarenakan Sudan masih mengalami konflik sipil di negaranya. (Xu, 2017).. Adanya bantuan dari Tiongkok ke Sudan Selatan bernilai setidaknya \$ 21 juta, dan bisa mencapai \$ 45 juta di masa depan. 15 Bantuan Tiongkok mengurangi tekanan terhadap Sudan Selatan dan itu pasti sesuatu yang dibutuhkan Sudan Selatan. Selain itu, Tiongkok juga telah menciptakan hubungan yang unik dengan Sudan. minyak di Sudan Selatan yang sangat dibutuhkan oleh Tiongkok . Tiongkok dan Sudan Selatan bisa membangun hubungan unik yang menciptakan situasi win-win untuk kedua belah pihak. Tiongkok sementara bersedia meminjamkan uang ke Sudan Selatan, dengan imbalan Tiongkok meminta minyak sebagai imbalannya (Xu, 2017).

Sementara itu Caroline Francis, Pratheepan Madasamy, Sharif Sokkary dan Sokunpanha berpendapat bahwa ada dua tantangan Tiongkok menghadapi dua tantangan besar dalam upayanya untuk membantu memperbaiki kebutuhan yang ada di Sudan. Pertama akan mengatasi ketidakpercayaan Sudan Selatan terhadap Tiongkok; klaim tanpa campur tangan harus diikuti oleh kesepakatan yang lebih adil antara utara dan selatan. Kedua adalah resiko pembaruan perang penuh antara kedua belah pihak. Tiongkok dapat membantu mencegah hal ini dengan mengurangi persenjataannya pengiriman ke daerah tetapi jika situasinya memburuk Tiongkok mungkin tidak memiliki cukup strategis minat untuk tetap terlibat (Francis, 2012).

Sementara itu Caroline Francis, Pratheepan Madasamy, Sharif Sokkary dan Sokunpanha berpendapat bahwa ada dua tantangan Tiongkok menghadapi dua

tantangan besar dalam upayanya untuk membantu memperbaiki kebutuhan yang ada di Sudan. Pertama akan mengatasi ketidakpercayaan Sudan Selatan terhadap Tiongkok; klaim tanpa campur tangan harus diikuti oleh kesepakatan yang lebih adil antara utara dan selatan. Kedua adalah resiko pembaruan perang penuh antara kedua belah pihak. Tiongkok dapat membantu mencegah hal ini dengan mengurangi perseniataannya pengiriman ke daerah tetapi jika situasinya memburuk Tiongkok mungkin tidak memiliki cukup strategis minat untuk tetap terlibat (Francis, 2012).

Sementara itu Caroline Francis, Pratheepan Madasamy, Sharif Sokyary dan Sokunkanha berpendapat bahwa ada dua tantangan Tiongkok menghadapi dua tantangan besar dalam upayanya untuk membantu memperbaiki kebutuhan yang ada di Sudan. Pertama akan mengatasi ketidakpercayaan Sudan Selatan terhadap Tiongkok; klaim tanpa campur tangan harus diikuti oleh kesepakatan yang lebih adil antara utara dan selatan. Kedua adalah resiko pembaruan perang penuh antara kedua belah pihak. Tiongkok dapat membantu mencegah hal ini dengan mengurangi perseniataannya pengiriman ke daerah tetapi jika situasinya memburuk Tiongkok mungkin tidak memiliki cukup strategis minat untuk tetap terlibat (Francis, 2012).

Penulis lain yaitu Nurul Minchah juga mengatakan bahwa adanya ketergantungan dan aktor dalam kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Sudan. Kerja sama antara Tiongkok dengan Sudan menyebabkan tingginya tingkat interdependensi atau ketergantungan satu sama lain. Tiongkok bergantung pada pasokan minyak dari Sudan. Sedangkan Sudan dan Sudan Selatan bergantung pada

bantuan luar negeri serta peningkatan devisa negara yang diperoleh dari penjualan minyak ke Tiongkok. Aktor sendiri berguna untuk bagaimana Tiongkok dan Sudan saling mengambil keputusan domestiknya untuk menjalankan kerja sama (Minchah N. , 2016).

Penelitian sebelumnya terkait kerja sama Tiongkok-Sudan yang pertama membahas kerja sama yang dilakukan Tiongkok dan Sudan merupakan strategi Tiongkok untuk melawan Amerika Serikat yang mana menekankan kepada persaingan ekonomi dan politik kekuasaan. Tiongkok memiliki strategi sendiri agar negaranya menjadi negara yang memiliki power yang besar untuk bisa menandingi negara lainnya dengan memanfaatkan elit penguasa yang berkuasa. Kebanyakan penelitian yang membahas isu kerja sama yang dilakukan Tiongkok dan Sudan lebih mengarah pada bantuan finansial yang diberikan oleh Tiongkok ke Sudan dan sebagai balasannya Sudan memberikan pasokan minyaknya kepada Tiongkok. Kemudian kesamaan yang lain terletak pada bagaimana Tiongkok kemudian memberikan bantuan tersebut untuk pembangun infrastuktur yang ada di Sudan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana ketergantungan yang dijalankan antar keduanya dapat mempengaruhi keberlangsungan kerja sama.

1.7. Landasan Teori/Konsep/Model

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori *complex interdependence* menurut Robert Owen Keohane dan Joseph S. Nye. Teori interdependensi kompleks ini membahas bagaimana hubungan kerja sama yang dilakukan para aktor sebagai solusi yang baik untuk mencapai tujuan nasional

ataupun bisa menyelesaikan permasalahan bersama. Adanya kerja sama transnasional yang dilakukan oleh para aktor negara akan memperlihatkan semakin besarnya peningkatan pada kompleksitas hubungan kerja sama tersebut, sehingga akan berdampak pada kondisi sebuah negara dan akan terciptanya hubungan saling ketergantungan akibat meningkatnya kompleksitas kerja sama (Nye, 1997).

Dalam teori interdependensi kompleks ada tiga poin utama yaitu :

- A. *The usage of multiple channels between societies in interstate, transgovernmental and transnational relations.* Pada teori ini menjelaskan adanya interaksi yang dilakukan oleh para aktor yang kemudian menciptakan sebuah hubungan yang saling bergantung satu sama lain, aktor yang terlibat disini bukan hanya aktor negara saja akan tetapi aktor non-negara juga dianggap mampu memberikan pengaruhnya untuk membuat sebuah kebijakan dalam pemerintah di sejumlah negara sehingga pengaruh yang telah diberikan dapat mempengaruhi sensitivitas negara lain.
- B. *The absence of hierarchy among issues (Multiple Issues).* Mengenai isu yang ada, para aktor tidak memiliki susunan yang jelas terkait fokus utama dalam pemilihan isu, karena setiap aktor yang terlibat memiliki area isu utama yang berbeda-beda.
- C. *Military force is not used by governments toward other governments within the region, or on the issues, when complex interdependence prevails.* dalam teori interdependensi kompleks kekuatan militer bukanlah instrumen yang signifikan, karena pola kompleksitas yang terjadi membuat penggunaan kekuatan militer menjadi tidak efektif dalam berbagai isu, sehingga

kebutuhan negara terhadap penggunaan militer semakin berkurang. Sehingga negara-negara sekarang lebih dominan membahas pada sektor ekonomi, politik, lingkungan dan lainnya untuk pembagunan negara (Nye, 1997).

Jika dilihat pada kasus ini adalah Tiongkok dan Sudan yang kemudian bergantung satu sama lain akibat adanya factor ketergantungan yang terjadi antar keduanya, dan melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negaranya. Aktor yang terlibat dalam kerja sama tersebut kemudian melakukan interaksi dan membuat suatu timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain. Jika disangkut pautkan isu yang akan dibahas kerja sama antara Tiongkok dengan Sudan menyebabkan tingginya tingkat interdependensi atau ketergantungan satu sama lain. Tiongkok bergantung pada pasokan minyak dari Sudan. Sedangkan Sudan bergantung pada bantuan luar negeri serta peningkatan devisa negara yang diperoleh dari penjualan minyak ke Tiongkok. Kebijakan yang dibuat oleh Tiongkok dalam hal kerja sama yang dilakukan yaitu memberikan bantuan berupa bantuan finansial dan pasokan senjata akan memberikan dampak yang besar pada keberlangsungan yang ada di Sudan. Kemudian adanya batasan otonomi yang terjadi di Sudan akibat hubungan yang dijalin antar keduanya.

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam metode tersebut dilakukan dengan studi kasus dengan menggunakan teori untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. metode penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai suatu acara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, dan pengambilan dokumen (Wahidmurni, 2017). Dalam ilmu sosial dan politik, penelitian kualitatif biasa digunakan sebagai metode utama dalam penelitian. dalam hal ini ilmu sosial memiliki sifat yang berdasarkan ilmu pengetahuan pada dinamika interaksi sosial, karena interaksi sosial adalah fenomena yang masih abstrak, maka tidak semua bisa dihitung.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah Tiongkok, karena pada penelitian ini difokuskan pada bagaimana strategi Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan energinya melalui konflik sipil Sudan. Kemudian objek pada penelitian ini adalah faktor ketergantungan Tiongkok untuk mendapatkan pasokan energi dari Sudan. karena dalam kerja sama yang dilakukan antara Sudan dan Tiongkok dapat mempengaruhi keadaan masing-masing negara. Hal ini yang akan diteliti pada penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada penelitian melainkan data akan diperoleh melalui orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiono, 2016). Data sekunder ini dapat didefinisikan sebagai data atau tulisan yang berupa laporan dari penelitian orang lain di mana diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini untuk memperoleh data, penulis akan melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi

4. Proses Penelitian

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa laporan resmi organisasi dan pemerintah, buku-buku, surat kabar, jurnal, laporan, media massa maupun internet seperti web pemerintahan resmi, berita-berita yang memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Melalui studi kepustakaan dan dokumen penulis ingin menemukan beberapa hal untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu apa saja strategi yang digunakan oleh Tiongkok dalam mencapai kebutuhan energinya melalui konflik yang terjadi di Sudan.

BAB II

KONDISI DOMESTIK DAN DINAMIKA KERJA SAMA

TIONGKOK-SUDAN

2.1. Kondisi Domestik Tiongkok dan Sudan

Tiongkok merupakan salah satu negara yang ada di kawasan Asia Timur dengan tingkat populasi yang besar yaitu menginjak angka 1,35 miliar penduduk. Bentuk negara dari Tiongkok sendiri yaitu Republik dengan sistem pemerintahannya yaitu Parlementer (Lahr H. Z., 2018).

Adanya industri yang berjalan di Tiongkok berdampak besar bagi perekonomian negaranya. Industri dan pembangunan Tiongkok bergantung pada impor bahan bakar energi, dan bahkan diprediksi sampai tahun 2033. Adanya industrialisasi sangat berdampak besar pada sektor ekonomi Tiongkok. Tiongkok membutuhkan pasokan energi global untuk memenuhi cadangan energi yang ada di negaranya. Karena semakin hari semakin bertambah permintaan akan energi minyak ini, pasokan minyak yang ada di Tiongkok mulai habis. ladang minyak yang lama seperti daging di daerah Timur Laut telah habis dan belum ditemukan ladang baru. Besarnya kebutuhan minyak di Tiongkok, menyebabkan Tiongkok membutuhkan pasokan minyak lebih (Lahr H. Z., 2018).

Kebutuhan akan energi yang terus meningkat, sementara semakin menipisnya cadangan minyak bumi memaksa negara-negara maju untuk mencari sumber-sumber energi alternatif. *The US Energy Information Administration* dalam *International Energy Outlook* pada tahun 2013 memprediksikan bahwa konsumsi

energi dalam kurun waktu 30 tahun ke depan diperkirakan meningkat hingga 56% yang juga didorong oleh kumpulan negara-negara berkembang (Coal, 2014).

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat membuat Tiongkok memerlukan sumber daya alam untuk bisa menghasilkan barang-barang produksi bagi pabrik-pabrik yang memproduksinya. Tiongkok memerlukan sumber daya alam berupa minyak, gas, mineral dan material mentah lainnya. Oleh karena itu konsumsi minyak yang ada di Tiongkok mengalami kenaikan pesat. Diperkirakan dari tahun 2001-2010 produksi minyak Tiongkok berkisar 15,93%. Sedangkan, jumlah konsumsi minyaknya terus mengalami kenaikan sebesar 48,38% sehingga menimbulkan jarak yang sangat jauh berkisar 32,45% (Coal, 2014).

Pertumbuhan ekonomi dan banyaknya permintaan dari konsumen yang terus meningkat maka dapat dipastikan bahwa Tiongkok akan mengimpor 60% dari total konsumsi minyak domestiknya atau sekitar 6-11 juta barel per hari pada tahun 2020. Tidak bisa dipungkiri Tiongkok sangat membutuhkan sumber pemasok minyak untuk memenuhi kebutuhannya. Adanya kesenjangan antara jumlah produksi dan konsumsi minyak yang ada akibat perkembangan industri yang pesat mau tidak mau Tiongkok harus segera melakukan kerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Akibat menurunnya cadangan minyak Tiongkok Perdana Menteri Tiongkok Li Peng pada tahun 1993 mengeluarkan kebijakan mengamankan kestabilan suai minyak jangka panjang sebagai tujuan strategis negara (Zhidong Li, 2013).

Kelangkaan minyak ataupun pemakaian minyak secara berlebihan bukan hanya Tiongkok yang mengalami tetapi juga negara-negara lain yang bergerak di

sektor industri. Dikarenakan adanya kelangkaan minyak akibat pemakaian secara terus menerus tersebut membuat negara-negara berkompetisi memperebutkan bahan mentah hal ini salah satu latar belakang munculnya konflik antar negara. Munculnya konflik tersebut disebabkan oleh bahan mentah dari alam dapat mendukung perkembangan perekonomian suatu negara, yang sering kali diperebutkan yaitu bahan bakar fosil yang sering sekali digunakan dan dapat digunakan untuk mencukupi hampir tiga per empat dari seluruh kebutuhan energi yang ada. Bahan bakar fosil ini harus melalui berjuta-juta tahun untuk terbentuk dan jika habis tidak bisa diperbaharui lagi (Okeke, 2009).

Akibat sulitnya melakukan peralihan pada penggunaan sumber energi alternatif mengakibatkan semakin memperburuk perebutan sumber daya energi. Bukan hanya masalah peralihan penggunaan sumber daya saja tetapi juga masalah kestabilan harga juga menjadi masalah keamanan bagi negara karena, ketersediaan dan harga energi akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian (Okeke, 2009).

Adanya faktor-faktor tadi melatarbelakangi Tiongkok harus melakukan ekspansi ke negara-negara penghasil minyak. Negara-negara penghasil minyak yang melimpah menjadi sasaran bagi Tiongkok untuk dijadikan sebagai pemasok bagi kebutuhan minyak Tiongkok. Sumber utama bagi minyak Tiongkok yaitu negara-negara Timur Tengah, namun kini hubungan antara Tiongkok dan negara-negara yang ada di Afrika mulai menjadi sorotan Afrika merupakan wilayah yang memiliki kekayaan minyak dan sumber daya lainnya yang dapat menopang

kebutuhan energi Tiongkok. Oleh karena itu Tiongkok kemudian beralih pada negara-negara yang ada di Afrika khususnya Sudan (Larry Hanauer, 2014).

Beralih pada Sudan dan konfliknya. Konflik tersebut terjadi di Darfur, Sudan. Darfur merupakan suatu provinsi yang terletak di Sudan bagian barat dan berbatasan langsung dengan negara Chad dan Republik Afrika Tengah. Konflik yang terjadi di Sudan disebabkan marginalisasi (pembatasan hak kepada kelompok tertentu) yang dilakukan pemerintah dan adanya perebutan sumberdaya alam terkait air, ladang untuk peternakan maupun pertanian. Darfur dihuni sekitar 30 kelompok etnis dan jumlah populasi mencapai 6 juta orang (Andhony, 2018). Konflik etnis yang terjadi di Darfur terbagi menjadi dua kubu yaitu etnis Arab dan golongan zhurga (kulit hitam) yang terdiri dari etnis-etnis telah lama tinggal di Sudan. Etnis Arab adalah etnis pendatang yang tinggal di sebelah utara dan selatan Sudan. Konflik antara etnis Arab dan golongan zhurga sudah terjadi sejak tahun 1970 dan semakin memburuk hingga tahun 1980-an. Kemudian perang antara etnis Arab dan etnis Fur pada tahun 1987-1989 menjadikan konflik etnis Darfur sebagai krisis kemanusiaan terburuk di Afrika (Andhony, 2018).

Konflik terjadi kembali pada tahun 2003, dan muncul gerakan pemberontak Darfur Liberation Front (DLF) yang kemudian berubah menjadi *Sudan Liberation Movement (SLM)* dan muncul juga kelompok lainnya yaitu, *Justice and Equality Movement (JEM)*. Beberapa etnis dari zhurga seperti Fur, Zaghawa, dan Masalit tergabung ke dalam kelompok pemberontakan tersebut. Tujuan dari kelompok pemberontak ini adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk bertindak adil terutama pada akses ekonomi yang mencakup kehidupan yang layak dan partisipasi politik

yang demokratis. Kelompok ini menilai selama puluhan tahun ras Afrika selalu dikesampingkan dari arena politik dan adanya kebijakan ekonomi dimana ras Arab dianggap lebih diuntungkan. Konflik semakin memanas ketika melibatkan milisi Janjaweed (etnis Arab) yang didukung pemerintah Sudan untuk melawan kelompok pemberontakan SLM dan JEM di Darfur (Andhony, 2018). Janjaweed diketahui mendapat bantuan dana, logistik serta perlengkapan senjata dari pemerintah Sudan. Kehadiran milisi Janjaweed membuat SLM dan JEM semakin meningkatkan intensitas konflik, mengingat milisi Janjaweed terdiri dari etnis Arab yang merupakan etnis pendatang sehingga mengindikasikan etnis tersebut mendukung pemerintahan Sudan. Konflik ini mengakibatkan korban yang tewas berjumlah hingga 300.000 orang, 1,8 juta penduduk mengungsi, dan sekitar 2800 desa hancur. Konflik di Sudan baru mendapatkan perhatian masyarakat internasional sekitar awal tahun 2004 (Andhony, 2018).

Akibat adanya konflik sipil yang berlangsung di Sudan mengakibatkan Sudan mau tidak mau meminta bantuan dari negara lain. Sudan kemudian mendapatkan bantuan dari Tiongkok, dan menjadi salah satu negara yang beruntung dapat menerima bantuan dari negara Tiongkok. Sudan menjadi salah satu negara di benua Afrika yang menggantungkan bantuan ke Tiongkok sebesar 50% dari devisa perkapita Sudan per tahun. Bantuan tersebut digunakan untuk bantuan kemanusiaan dan berupa pinjaman luar negeri. Kemudian ketidakstabilan ekonomi yang ada akibat konflik sipil ini mengakibatkan Sudan benar-benar bergantung kepada Tiongkok. Ditambah Tiongkok membela Sudan di sidang PBB yang didukung juga oleh Rusia (Large, 2009).

2.2 Dinamika Hubungan Kerja Sama Tiongkok-Sudan

Kebanyakan negara yang ada di Afrika mengalami kemiskinan dan kelaparan. Tidak salah jika negara ini sering disebut negara yang tertinggal. Permasalahan yang terjadi di Afrika seperti perang sipil yang berkepanjangan, kemiskinan, dan kelaparan, rezim yang otoriter juga sering kali melanggar Hak Asasi Manusia. adanya faktor-faktor tersebut berdampak pada adanya ketidakstabilan domestik bagi negara-negara yang ada di Afrika sehingga posisi negara di kancah internasional dan kurangnya kemampuan berdiplomasi jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti di Eropa dan Asia. Hal ini kemudian diamati oleh Tiongkok untuk mencari celah menjalin kerja sama dengan negara-negara Afrika. Tiongkok menawarkan hubungan non-interferensi dengan negara-negara yang ada di Afrika. Hal ini sangat disambut baik oleh negara-negara yang ada di Afrika. Hal ini kemudian mendorong tingginya investasi Tiongkok di Afrika, seperti Foreign Direct Investment (FDI) Tiongkok di Afrika yang pada tahun 2005 mencapai US\$1.6 triliun. Peta investasi berikut memberikan gambaran persebaran FDI Tiongkok di Afrika yang cukup tinggi (Setiawan, 2014).

Hubungan Tiongkok dan Sudan dalam penguatan progresif mengantarkan kerja sama dari 2005-2008. Pada tahun tersebut Tiongkok dan Sudan membangun hubungan diplomatik yang cukup erat, ketika salah satu delegasi Sudan melakukan kunjungan ke Beijing pada maret 2005 membahas masalah ekonomi. Kemudian dari pihak Sudan melakukan kunjungan kembali pada tahun 2007 membahas masalah politik antar kedua belah pihak (Ofodile, 2009).

Jika dilihat dari persebaran FDI Tiongkok di Afrika pada tahun 2000-2005 yang berjumlah US\$1,6 triliun. Sudan merupakan negara penerima terbesar di Afrika dengan US\$300 juta diinvestasikan oleh Tiongkok yang memperlihatkan hubungan ekonomi yang kuat antara Tiongkok dengan Sudan. Oleh karena itu, Afrika mulai diperhitungkan karena adanya keberadaan cadangan minyak yang luar biasa besar. Afrika mulai dilirik sebagai sumber minyak alternatif bagi Tiongkok dengan cadangan minyak yang sudah terbukti dimiliki Afrika adalah sebesar 132.4 milyar bpd (barrels per day/barel per hari), 8% dari cadangan minyak dunia saat ini. (Setiawan, 2014).

Tiongkok bergabung menjadi partner energi minyak Sudan, setelah Sudan mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat pada tahun 1990-an terkait dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia. melihat adanya sanksi ekonomi yang terjadi di Sudan memberikan peluang besar bagi Tiongkok untuk menguasai dan menjadi pemain tunggal di sektor eksplorasi minyak yang ada di Sudan. Tiongkok menggunakan kebijakan non-interferensi, melalui sahamnya di *Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC)*, sebuah kerja sama internasional yang 40% sahamnya dimiliki oleh Tiongkok. GNPOC adalah satu-satunya dari dua proyek investasi Tiongkok hingga 2010. Walaupun jumlah tetapnya tidak dapat diketahui, Tiongkok melalui CNPC diperkirakan telah menginvestasikan lebih dari US\$4 triliun dalam bentuk investasi aktif dari total US10\$. triliun investasi Tiongkok di ranah eksplorasi minyak di Sudan. (Large, 2009).

Tiongkok menyempurnakan hubungannya secara resmi dengan Afrika dengan adanya kunjungan Hu Jintao ke berbagai kota negara-negara Afrika.

Banyak upaya kerja sama yang telah dilakukan Tiongkok dengan Afrika, di antaranya:

1. menetapkan dana pembangunan Tiongkok-Afrika senilai US\$5 miliar untuk mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok menanam modal di Afrika,
2. menyediakan pinjaman preferensial US\$3 miliar dan kredit pembeli preferensial senilai US\$2 miliar bagi Afrika selama tiga tahun kedepan,
3. menghapus utang negara-negara Afrika paling telilit utang dan paling terbelakang dalam bentuk utang pemerintah bebas bunga yang jatuh tempo pada akhir 2005, dan dalam 3 tahun berikutnya melatih 15.000 profesional Afrika,
4. mengirim 100 ahli pertanian ke Afrika,
5. membangun 30 rumah sakit dan 100 sekolah pedesaan, dan menambah jumlah beasiswa Pemerintah Tiongkok bagi mahasiswa Afrika dari 2000 orang menjadi 4000 orang per tahun 2009 (Rahmayeni, 2014).

Kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Sudan tidak selalu berjalan dengan baik ada berbagai dinamika dalam kerja sama yang dilakukan kedua negara ini. Tiongkok melakukan *oil diplomacy*, yaitu berupaya mengamankan pasokan minyak untuk kelancaran industri dan perekonomian (Lahr H. Z., 2018).

Konflik yang terjadi di Darfur, dipengaruhi oleh keberadaan Tiongkok di Sudan. Sudan menjual minyaknya ke Tiongkok sehingga memperoleh pendapatan bagi negara, sedangkan Tiongkok selain memperoleh minyak juga mengekspor persenjataan ke pemerintah Sudan. Persenjataan yang diperoleh pemerintah Sudan dari Tiongkok bukanlah hal yang baru, karena pada saat pemerintahan Jafar

Nimeiry (1965-1985) (Liao, 2013). keterlibatan Tiongkok di Sudan kemudian menjadi perhatian dunia internasional karena kebijakan non-interferensi Tiongkok dianggap tidak memedulikan permasalahan yang terjadi di Sudan seperti pelanggaran hak asasi manusia di dalam konflik Sudan, yang terlihat dari penolakan Beijing untuk menurunkan penjaga perdamaian di Darfur, namun dengan cepat menurunkan 400 pasukannya untuk menjaga sumur minyaknya di Sudan ketika situasi politik dan keamanan semakin mengancam sumur minyak Tiongkok di Sudan (Setiawan, 2014).

Salah satu bantuan yang diberikan Tiongkok ke Sudan yaitu memberikan suplai senjata untuk dikirimkan ke Sudan dan sebagai gantinya Tiongkok meminta bayaran dengan mengambil persediaan minyak yang ada di Sudan. Persenjataan tersebut antara lain ; persenjataan untuk militer, helikopter, pesawat tempur, tank T-59, senjata anti-pesawat kaliber 37mm dan howitzer kaliber 12mm, dan 220 truk (LeBrun, 2014). Pada tahun 2005-2009 dan 2010-2014 ekspor senjata utama dari Tiongkok mengalami peningkatan sebesar 143%. Adanya ekspor senjata ke Sudan membuat pasar ekspor Tiongkok meningkat secara global yang awalnya 3% menjadi 5 % (LeBrun, 2014). Sebagian dari persenjataan yang ada di Sudan yang dikirim oleh Tiongkok adalah *small and light weapon*, atau senjata kecil dan ringan. data yang dihimpun dari *UN Comtrade* menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok mengekspor *small arms and light weapon* dan beberapa jenis senjata lainnya menuju Sudan dalam jumlah yang sangat besar (LeBrun, 2014).

Perdagangan senjata merupakan aktivitas yang sangat sensitif dilakukan oleh negara-negara yang malakukannya. Maka dari itu, di buatlah sebuah norma

internasional yang menjadi acuan negara-negara tersebut untuk melakukan transaksi dengan aman dan sesuai aturan yang ada. Norma ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah senjata terakumulasi di daerah adanya transaksi senjata ini bisa menyebabkan terjadinya konflik dan hal yang bisa membahayakan negaranya. Poin penting dari norma ini adalah bahwa negara-negara yang mengekspor senjata harus menerapkan dan menegakkan peraturan yang memadai dalam mengontrol transfer senjata mereka. Oleh karena itu, masyarakat internasional melakukan pembatasan pengiriman senjata ke daerah yang teridentifikasi konflik (Arms, 2007). Tiongkok dalam hal ini dianggap telah melanggar perjanjian tersebut karena tidak memenuhi standar yang telah diberikan oleh pihak perizinan perdagangan senjata (Arms, 2007).

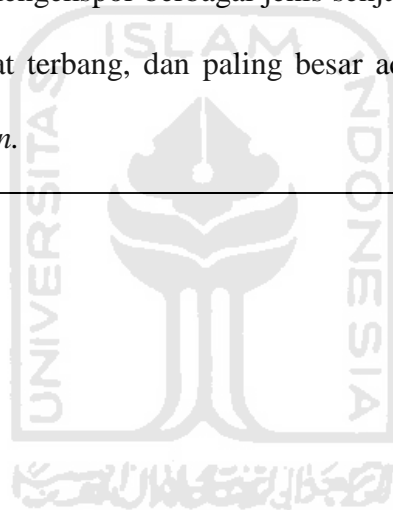
Selain itu Tiongkok dianggap tidak bertanggung jawab atas penjualan senjata telah tertera di pasal 4 dimana pada pasal ini adanya pengontrolan pengiriman senjata, dan tidak boleh mengirimkan senjata ke negara yang teridentifikasi konflik ataupun bisa membuat suatu negara atau daerah menjadi berkonflik atau mendapatkan masalah akibat penjualan senjata tersebut. Tiongkok paham betul bagaimana kondisi Sudan yang berkonflik, akan tetapi Tiongkok masih saja mengirimkan pasokan senjatanya besar-besaran, hal inilah yang membuat Tiongkok dianggap melanggar perjanjian dan membuat keruh konflik yang ada di Sudan (Arms, 2007).

Tabel 2.2. Kerja Sama Tiongkok-Sudan Tahun 2005-2014

Tahun	Sektor Kerja Sama
2005	Kunjungan Salva Kiir Mayardit, selaku delegasi Sudan ke Beijing menemui Hu Jintao membahas kerja sama ekonomi.
2007	Kunjungan Salva Kiir Mayardit ke Tiongkok pada Juli 2007 membahas dua topik politik: posisi Politik resmi kedua dalam Pemerintahan Persatuan Nasional Sudan.
2010	Tiongkok melakukan kebijakan non-interferensi yang 40% saham minyak yang ada di Sudan milik Tiongkok. Daftar proyek kerja sama antara lain: GNPOC menghasilkan 100,00 BPD saham ini dimiliki oleh SOE Tiongkok yaitu <i>China National Petroleum Company</i> (CNPC) yang berkolaborasi dengan Sudan sebesar US\$ 300 juta di sumur minyak Heglig dan Unity Tiongkok melakukan kebijakan non-interferensi yang 40% saham minyak yang ada di Sudan milik Tiongkok. Daftar proyek kerja sama antara lain: GNPOC menghasilkan 100,00 BPD saham ini dimiliki oleh SOE Tiongkok yaitu <i>China National Petroleum Company</i> (CNPC) yang berkolaborasi dengan Sudan sebesar US\$ 300 juta di sumur minyak Heglig dan Unity.
2005-2014	Persebaran FDI Tiongkok di Afrika berjumlah US\$ 1,6 triliun. Sudan merupakan negara penerima terbesar di Afrika sebesar US\$ 300 juta dalam bentuk investasi dan hubungan ekonomi.

Tahun	Sektor Kerja Sama
2011	<p>Kunjungan resmi Hu Jintao ke Sudan untuk meresmikan kerja sama dengan negara-negara Afrika khususnya Sudan. Kerja sama tersebut antara lain : [MOU6]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan dana pembangunan Tiongkok-Afrika senilai US\$5 miliar untuk mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok menanam modal di Afrika, 2. menyediakan pinjaman preferensial US\$3 miliar dan kredit pembeli preferensial senilai US\$2 miliar bagi Afrika selama tiga tahun kedepan, 3. menghapus utang negara-negara Afrika paling telilit utang dan paling terbelakang dalam bentuk utang pemerintah bebas bunga yang jatuh tempo pada akhir 2005, dan dalam 3 tahun berikutnya melatih 15.000 profesional Afrika, 4. mengirim 100 ahli pertanian ke Afrika, 5. membangun 30 rumah sakit dan 100 sekolah pedesaan, dan menambah jumlah beasiswa Pemerintah Tiongkok bagi mahasiswa Afrika dari 2000 orang menjadi 4000 orang per tahun 2009.[CJ7]
2005-2009 dan 2010-214	<p>Ekspor senjata utama Tiongkok mengalami peningkatan sebesar 143% - pasar ekspor Tiongkok meningkat secara global sebesar</p>

Tahun	Sektor Kerja Sama
	3% menjadi 5%. Berdasarkan data Comtrade PBB, Tiongkok menjadi salah satu pemasok terbesar ketiga di tahun 2010-2014.
1992-2005	Perjanjian dan kesepakatan suplai senjata
2011-2012	Menurut UN Comtrade pada tahun tersebut, Tiongkok mengekspor senjata ke Sudan dengan nilai mencapai US\$ 4 juta dan mencapai 100 ribu senjata.
2011	Tiongkok mengekspor berbagai jenis senjata dari amunisi, <i>spare part</i> pesawat terbang, dan paling besar adalah <i>small arms and light weapon</i> .



BAB III

FAKTOR KETERGANTUNGAN TIONGKOK-SUDAN

3.1 Tiongkok dan Sudan Sebagai Aktor Negara Menciptakan ketergantungan dalam Kerja Sama

Teori interdependensi kompleks membahas bagaimana hubungan kerja sama yang dilakukan para aktor sebagai solusi yang baik untuk mencapai tujuan nasional ataupun bisa menyelesaikan permasalahan bersama. Adanya kerja sama transnasional yang dilakukan oleh para aktor negara akan memperlihatkan semakin besarnya peningkatan pada kompleksitas hubungan kerja sama tersebut, sehingga akan berdampak pada kondisi sebuah negara dan akan terciptanya hubungan saling ketergantungan akibat meningkatnya kompleksitas kerja sama (Nye, 1997). Begitu juga dengan Tiongkok dan Sudan. Tiongkok dan Sudan sebagai aktor negara mencoba untuk membuka jaringan politik baru yang semakin terikat satu sama lain, dan mencoba menyelesaikan bersama-sama masalah yang ada dimasing-masing negara. Dalam kasus Tiongkok dan Sudan keduanya memainkan peran penting dalam mengembangkan ketergantungan yang mengakibatkan terjalinnya kerja sama yang mereka jalani.

Adanya latar belakang dari masing-masing negara yaitu Sudan dan Tiongkok kemudian terciptanya ketergantungan karena Tiongkok berupaya untuk meredam konflik yang ada di Sudan dan memberikan bantuan untuk Sudan. Keduanya menjalin hubungan sudah sejak lama, kemudian dari pihak Tiongkok dan Sudan saling melakukan kunjungan. Hubungan antara Tiongkok dan Sudan dalam

penguatan hubungan bilateral antar keduanya setelah tahun 2005. Kontak resmi yang dilakukan Tiongkok dan Sudan dilakukan ketika utusan delegasi Sudan mengunjungi Beijing pada Maret 2005 untuk membahas kerja sama ekonomi. Kemudian dari kunjungan tersebut, kerja sama yang dilakukan antara Tiongkok dan Sudan mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan memberikan keuntungan yang memuaskan antar kedua belah pihak. Kerja sama yang dilakukan bukan hanya pada sektor ekonomi tetapi juga pada sektor politik dan militer (lebih tepatnya perdagangan senjata) (Magland, 2008).

Pada teori yang dikemukakan oleh Robert Owen Keohane dan Joseph S. Nye ini terdapat beberapa variabel salah satunya *the usage of multiple channels between societies in interstate, transgovernmental and transnational relations*. Pada teori ini menjelaskan adanya interaksi yang dilakukan oleh para aktor yang kemudian menciptakan sebuah hubungan yang saling bergantung satu sama lain, aktor yang terlibat disini bukan hanya aktor negara saja akan tetapi aktor non-negara juga dianggap mampu memberikan pengaruhnya untuk membuat sebuah kebijakan dalam pemerintah di sejumlah negara sehingga pengaruh yang telah diberikan dapat mempengaruhi sensitivitas negara lain (Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, 1989).

Tiongkok sebagai aktor negara melakukan interaksi kepada negara-negara yang ada di Afrika salah satunya Sudan. Kedua aktor ini sama-sama [8] memiliki peran untuk memberikan hal yang menguntungkan bagi *partner* kerjanya. Adanya interaksi yang dilakukan oleh Tiongkok dan Sudan kemudian membawa keduanya kedalam ketergantungan yang kompleks. Tiongkok memberikan

berbagai bantuan seperti menetapkan dana pembangunan Tiongkok- Afrika senilai US\$5 miliar untuk mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok menanam modal di Afrika, menyediakan pinjaman profesional US\$2 miliar bagi Afrika selama tiga tahun kedepan, menghapus hutang negara-negara Afrika paling terlilit hutang dan paling terbelakang dalam bentuk utang pemerintah bebas bunga yang jatuh tempo pada akhir 2005, dan dalam 3 tahun berikutnya melatih 15.000 profesional Afrika, mengirim 100 ahli pertanian ke Afrika, membangun 30 rumah sakit dan 100 sekolah pedesaan, dan menambah jumlah beasiswa Pemerintah Afrika dari 2000 orang menjadi 4000 orang per tahun 2009 (Francis, 2012).

Awal mula ketergantungan tersebut ketika Tiongkok menyempurnakan hubungannya secara resmi dengan negara-negara yang ada di Afrika salah satunya Sudan dengan adanya kunjungan Hu Jintao ke beberapa kota yang ada di Afrika salah satunya yaitu Sudan. Bisa dilihat di sini bahwa Tiongkok ingin melakukan hubungan yang baik dengan negara-negara yang ada di Afrika salah satunya Sudan, dan dapat memposisikan diri sebagai negara yang sedang mencari negara lain untuk sama-sama melakukan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Negara dalam melakukan hubungan internasional diwakili oleh utusan diplomasi mereka, di sini perwakilan dari Tiongkok dalam kerja sama ini, yaitu Hu Jintao yang merupakan pemimpin Tiongkok pada masa itu (Faruk, 2008).

Adanya kunjungan resmi yang dilakukan Hu Jintao dan peresmian kerja sama tersebut juga menjadi salah satu strategi agar Tiongkok dapat melihat peluang dari sumber daya yang ada di Sudan. Karena tujuan awal Tiongkok adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Kunjungan tersebut menampilkan

bagaimana Hu Jintao pergi mengunjungi kilang minyak Khartoum yang ada di Sudan. Bersamaan dengan itu pihak dari Hu Jintao juga mengikutsertakan pasukan penjagaan perdamaian UNMIS Tiongkok dengan perusahaan Tiongkok untuk kepentingannya di Sudan. Perhitungan dari pihak Tiongkok lebih dari satu dekade yang harus dilakukan untuk melakukan intervensi di wilayah Sudan untuk meningkatkan pasokan minyak yang ada dan dikirim ke Tiongkok dalam jumlah yang besar. Tiongkok juga melakukan perluasan ekspor Tiongkok dan Sudan, serta melakukan bisnis di Sudan, akan tetapi persaingannya sangat luas (Faruk, 2008).

Teori interdependensi kompleks memperlihatkan bagaimana aktor negara saling memperlihatkan perannya dalam kerja sama internasional. Teori interdependensi kompleks juga menonjolkan aktor dominan yang akan mendominasi kerja sama yang dilakukan. Kemajuan dunia yang kemudian menciptakan jaringan yang lebih luas untuk menjalin kerja sama ekonomi, maupun politik dimanfaatkan Tiongkok dan Sudan dalam melakukan kerja sama (Nye, 1997).

Masing-masing negara mengirimkan perwakilannya untuk melakukan kerja sama. Bisa kita lihat di tabel [MOU9]2.2 tentang kerja sama Tiongkok-Sudan tahun 2005-2014, pada bab sebelumnya pada tahun 2005 dan 2007 adanya kunjungan Salva Kiir Mayardit selaku perwakilan delegasi Sudan untuk datang ke Beijing menemui Hu Jintao untuk membahas kerja sama ekonomi. Kunjungan kedua pada Juli tahun 2007 masih dengan delegasi yang sama yaitu Salva Kiir Mayardit ke Tiongkok membahas tentang politik, yaitu posisi politik resmi negara dalam pemerintah persatuan nasional Sudan [MOU10] (Suliman, 2008). Sudah

dijelaskan di bab sebelumnya bahwa Tiongkok sebagai aktor negara menginginkan sumber energi berupa minyak, batu bara, gas alam yang ada di Sudan. Sedangkan Sudan dengan negara yang memang membutuhkan bantuan sangat bergantung pada Tiongkok yang memberikan bantuan secara finansial dan senjata. Pada variable pertama tentang interdependensi kompleks telah berhasil membawa Tiongkok dan Sudan untuk saling berhubungan yang saling menguntungkan antar keduanya.

Tiongkok yang melihat Sudan sebagai negara yang berkonflik kemudian memberikan banyak bantuan berupa senjata sebagai alat untuk mempererat hubungan antar keduanya. Kemudian, Tiongkok menginvestasikan berbagai hal ke Sudan termasuk uang sejumlah US\$ 20 miliar, hibah, dan bantuan lainnya. Pemerintah Sudan bisa mengumpulkan sebanyak US\$ 30 miliar atau lebih dari total pendapatan minyak. Sudan merupakan produsen minyak terbesar ketiga di Benua Afrika dengan memiliki 563.000.000 barel cadangan minyak (Atree, 2012).

Tiongkok sebagai aktor negara memainkan strateginya untuk memasukan perusahaan-perusahaan asing ke Sudan untuk melakukan kerja sama energi di Sudan. ada sekitar 15 perusahaan yang beroperasi di bidang energi yang ada di Sudan (Large, 2009) . Tiongkok sebagai aktor utama lebih fokus kepada politik, hubungan diplomatik, dan perdagangan untuk kepentingan perekonomian Tiongkok itu sendiri. Tiongkok sukses menggunakan kebijakan untuk memperoleh ekuitas di ladang minyak negara lain, khususnya di ladang minyak dari negara-negara yang relatif sedang krisis seperti Sudan, dan dihindari oleh perusahaan minyak milik Barat. Keuntungan yang diperoleh Tiongkok dari segi ekonomi meliputi:

1. Tiongkok mendapatkan jaminan dalam penguasaan sumber minyak di negara pengekspor.
2. Membeli saham di ladang minyak dapat menurunkan harga minyak yang diimpor oleh Tiongkok dalam jangka panjang.
3. Tiongkok tidak memiliki kompetitor lain dalam perebutan minyak di negara-negara yang mengalami krisis karena negara Barat sangat menghindarinya disebabkan ketakutan akan sanksi yang dijatuhkan (Large, 2009).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa baik Tiongkok dan Sudan memiliki kepentingan nasional yang sama yaitu peningkatan di sektor ekonomi masing-masing negara. Peningkatan di sektor ekonomi dan menjadikan ekonomi sebagai kekuatan negara merupakan faktor penting dalam keberlangsungan suatu negara. Tiongkok dan Sudan terlihat saling mempertahankan keuntungan yang diperoleh dari kerja sama yang telah terjalin (Large, 2009).

ketergantungan yang dialami pihak Sudan kemudian dimanfaatkan Tiongkok untuk menginginkan legitimasi politik. Pemerintah Tiongkok percaya bahwa memperkuat hubungan Tiongkok-Afrika membantu meningkatkan pengaruh Tiongkok pada level internasional. Tiongkok memiliki kebijakan “*One China Policy*”, yaitu kebijakan yang mengakui bahwa hanya ada satu negara di Tiongkok dengan nama resmi PRC atau *People’s Republic of China*. Kebijakan ini merupakan prasyarat bagi setiap entitas politik untuk menjalin hubungan diplomatik dengan republik Rakyat Cina. Kebijakan ini membuat negara-negara mengakui bahwa PRC merupakan satu-satunya pemerintahan yang legal dan

Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah PRC. Selain sebagai prasyarat mengadakan hubungan diplomatik, *One China Policy* juga digunakan sebagai prasyarat untuk menarik bantuan dan investasi Tiongkok. Hal ini dilakukan negara Tiongkok jika ada negara yang melanggar prinsip *One China Policy*. Dan disini Sudan menandatangani perjanjian tersebut (Francis, 2012).

Keterlibatan pemerintah Tiongkok di Sudan telah berhasil menunjukkan bagaimana kerja sama yang reaktif dan fleksibel, perkembangan kerja sama ini menjadi bukti pada tahun 2006-2007. Adanya kepentingan ekonomi serta perbedaan politik yang ada dapat mendukung intervensi di Sudan. Adanya intervensi yang dilakukan Tiongkok di Sudan tidak membuat Sudan merasa tidak nyaman dan terusik, karena Sudan telah mempercayai Sudan sebagai rekan kerjanya, dan adanya ketidakpercayaan Sudan terhadap Amerika membuat kedua aktor ini lancar menjalani kerja sama (Gould, 2019). Dilihat dari Presiden Sudan yang tidak terlalu rentan terhadap tekanan yang diberikan oleh Tiongkok walaupun banyak asumsi yang mendorong kerja sama yang dilakukan keduanya tidak sehat. Keterlibatan Tiongkok di Sudan memberikan dampak yang lebih luas di kancan internasional. Kerja sama yang dilakukan melebihi harapan yang telah dibuat oleh Tiongkok hal tersebut akan lebih mudah memperbaiki kerusakan yang terjadi di Sudan akibat adanya perang sipil yang terjadi (Hale, 2013).

Selain itu dalam teori interdependensi kompleks variable lain yang mengatakan adanya *the absence of hierarchy among issues (Multiple Issues)*. Mengenai isu yang ada, para aktor tidak memiliki susunan yang jelas terkait fokus utama dalam pemilihan isu, karena setiap aktor yang terlibat memiliki area isu

utama yang berbeda-beda (Nye, 1997). Dalam kasus Tiongkok dan Sudan isu utama yang ada antara keduanya lebih berfokus pada konflik yang terjadi di Sudan. Bagaimana Tiongkok dan Sudan sama-sama saling berdiskusi bagaimana cara meredam konflik yang terjadi di Sudan. Sudan menjadi partner kerja sama Tiongkok sangat berharap besar kepada Tiongkok untuk bisa membantu menstabilkan kondisi yang ada di Sudan.

3.2 Ketergantungan Tiongkok dan Sudan untuk Memenuhi National Interest

Ketergantungan sangat erat kaitannya dengan bagaimana sesuatu itu tidak lepas dari salah satu media yang menjadi kebutuhannya sehingga tidak bisa lepas dari hal yang sudah menjadi kebutuhan. Jika dilihat dari definisi tersebut Tiongkok dan Sudan merupakan suatu media atau aktor yang memiliki kebutuhan yang kemudian kebutuhan tersebut membuat Tiongkok dan Sudan saling ketergantungan. Ada dua faktor Tiongkok dan Sudan menjadi saling bergantung satu sama lain. Tiongkok membutuhkan sumber energi yang ada di Sudan sedangkan Sudan membutuhkan Tiongkok untuk bisa membantu Sudan dalam menstabilkan negaranya yang sedang berkonflik.

Hubungan Sudan dengan Tiongkok memiliki sejarah yang cukup panjang. Hubungan bilateral yang dilakukan dimulai tiga tahun setelah kemerdekaan Sudan pada tahun 1956. Sejak itu, Tiongkok memelihara hubungan baik dengan berbagai rezim politik yang ada di Sudan secara konsisten dan menghormati kedaulatan dan menjalankan prinsip non-intervensi (Liao, 2013). Kebutuhan yang membuat Tiongkok dan Sudan menjadi saling bergantung dilandasi dengan kerja sama yang

dilakukan keduanya. Kebutuhan Tiongkok dan Sudan berupa kerja sama ekonomi dan politik yang kemudian kerja sama ini membuat kedua negara tersebut menjadi saling bergantung. Tiongkok harus memenuhi kebutuhan domestiknya berupa mencari cadangan minyak dari negara-negara penghasil minyak salah satunya Sudan. Sudan juga bukan tanpa alasan menerima Tiongkok sebagai rekan kerjanya, Tiongkok pemasok terbesar senjata dan pinjaman untuk pembangunan berkelanjutan yang ada di Sudan (Hurst, 2008).

Ketergantungan ini dimulai dari keberadaan Tiongkok di Sudan. Tiongkok sebagai negara industri yang mulai mengalami kelangkaan terhadap sumber energi sebagai komoditas utama untuk menjalankan industrinya membuat Tiongkok harus mencari negara penghasil minyak untuk memenuhi kebutuhan domestik negaranya. Adanya faktor-faktor tadi melatarbelakangi Tiongkok harus melakukan ekspansi ke negara-negara penghasil minyak (Huang, 2007). Negara-negara penghasil minyak yang melimpah menjadi sasaran bagi Tiongkok untuk dijadikan sebagai pemasok bagi kebutuhan minyak Tiongkok. Sumber utama bagi minyak Tiongkok yaitu negara-negara Timur Tengah, tetapi kini Tiongkok mulai bergerak ke negara-negara yang ada di Afrika karena Afrika merupakan wilayah yang memiliki kekayaan minyak dan sumber daya lainnya yang dapat menopang kebutuhan energi Tiongkok. Oleh karena itu, Tiongkok kemudian beralih pada negara-negara yang ada di Afrika khususnya Sudan (Ayu, 2019).

Keberadaan Tiongkok dapat dilihat dari adanya perusahaan minyak *China National Petroleum Corporation* (CNPC) yang merupakan investor asing terbesar di Sudan. Ada sekitar US\$5 miliar dalam pembangunan ladang minyak yang ada di

Sudan. Tiongkok membutuhkan 65% hingga 80% dari 500.00 barel/hari produksi minyak Sudan. Salah satu dari perjanjian yang tertera antar kedua negara ini adalah Tiongkok berupaya menciptakan perdamaian yang ada di Sudan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya CNOOC ini hadir sebagai upaya Tiongkok untuk mengambil bagian dalam penyelesaian konflik di kedua negara Sudan, yaitu Sudan dan Sudan Selatan (Xinhua, 2017).

Adanya hubungan timbal balik yang ada di teori interdependensi kompleks juga menjadi suatu hal penting yang tidak bisa dihilangkan. Timbal balik di sini berkaitan dengan bagaimana Tiongkok dan Sudan saling ketergantungan satu sama lain. Timbal balik yang dilakukan oleh Tiongkok dan Sudan terlihat dari bagaimana mereka memberikan keuntungan satu sama lain. Dari data yang telah didapatkan, keuntungan-keuntungan dari kerja sama yang dilakukan tersebut yang membuat kedua aktor negara ini kemudian menjadi tergantung satu sama lain.

Faktor lain yang menyebabkan kedua aktor ini saling ketergantungan yaitu mereka sama-sama ingin memenuhi kebutuhan domestiknya dengan cara saling menukar sesuatu yang diperlukan oleh kedua negara ini. Sudan yang memiliki sumber energi alam yang berlimpah tentu saja menggunakan sumber energinya sebagai alat tukar dari kerja samanya dengan Tiongkok. Sedangkan Tiongkok dengan predikatnya sebagai peringkat kedua negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi jelas akan memberikan bantuan berupa pinjaman uang dan pembangunan infrastruktur serta memberikan pasokan senjata ke Sudan melihat kondisi Sudan yang menurut Tiongkok memerlukan senjata untuk melakukan perang (Setiawan, 2014).

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Tiongkok membuat Sudan semakin tidak ingin melepaskan Tiongkok sebagai rekan kerja samanya (Minchah N. , 2016). [MOU11] Di sisi lain, Tiongkok membuat strategi bagaimana cara menguasai seluruh kilang minyak yang ada di Sudan (Hui, 2015). Persebaran FDI Tiongkok di Afrika pada tahun 2005-2014 juga mengalami kenaikan yang besar yang berjumlah US\$1,6 triliun. Sudan juga sebagai negara penerima terbesar di Afrika memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan pembangunan infrastruktur secara bertahap untuk memulihkan kondisi yang ada di negaranya. Bantuan diberikan Tiongkok ini juga sebagai strategi Tiongkok melakukan investasi. Sudah mendapat pinjaman sebesar dengan US\$300 juta diinvestasikan oleh Tiongkok ke Sudan untuk memperlihatkan hubungan ekonomi yang kuat antara Tiongkok dengan Sudan (Hui, 2015).

Adanya kenaikan FDI Tiongkok yang menjadi salah satu alasan mengapa negara-negara yang ada di Afrika khususnya Sudan sangat diperhitungkan keberadaannya di kancah internasional. Afrika memiliki cadangan minyak sebesar 132,4 miliar bpd (barrels per day/barel per hari), dan 8% dari cadangan minyak dunia saat ini. Besarnya nominal cadangan minyak yang ada tersebut merupakan sebagian kecil dari cadangan minyak yang diperkirakan ada di Afrika. Besarnya cadangan minyak yang dimiliki oleh negara-negara yang ada di Afrika, akan tetapi sumber minyak tersebut hanya dikuasai oleh sebagian kecil negara-negara yang ada di kawasan Afrika (Setiawan, 2014).

Kedua negara ini saling memenuhi masing-masing kebutuhan domestik negaranya melalui kerja sama yang dilakukan. Ketergantungan terjadi berawal

ketika seorang aktor tidak bisa lepas dari aktor lainnya karena adanya kebutuhan yang harus dicapai (Francis, 2012) Tiongkok dan Sudan berhasil mencapai kebutuhan yang mereka inginkan, dengan adanya hubungan timbal balik baik itu Tiongkok ataupun Sudan dapat memenuhi kebutuhannya dengan saling menukar kebutuhan yang ada. Sudan yang selalu menjadi primadona Tiongkok yang dilihat dari banyaknya kilang minyak yang ada membuat Tiongkok selalu bersemangat melakukan kerja sama dengan Sudan. Kebutuhan dalam negeri mengakibatkan Tiongkok mengintervensi Sudan (Francis, 2012).

Sudan sama halnya dengan Tiongkok. Sudan tidak terlalu ambil pusing dengan tekanan yang dilakukan oleh pihak Hu Jintao, yang terpenting adalah bantuan secara (Larry Hanauer, 2014). finansial dan bantuan senjata dari Tiongkok tetap terus dikirimkan ke Sudan Sudan negara yang miskin membutuhkan bantuan secara finansial untuk menstabilkan negaranya, negara yang sedang berkonflik pasti membutuhkan banyak biaya untuk pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan rakyatnya. Ditambah konflik yang ada mengharuskan Sudan memiliki senjata sebagai pertahanan negara dan individu. Meskipun hal tersebut melanggar hak asasi manusia, hal tersebut tidak membuat Sudan takut. Ditambah Sudan dibela oleh Tiongkok akibat konflik yang terjadi membuat hubungan antar keduanya semakin terjalin dengan baik (Okeke, 2009).

Ketergantungan merupakan keadaan negara–negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara–negara lain, negara–negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Pada kasus ini, Tiongkok berperan besar dalam mensejahterakan Sudan, walaupun balasan

yang harus diterima Sudan juga tidak sedikit. Jika mengutip definisi ketergantungan diatas Tiongkok memberikan pengaruh besar dalam perpolitikan yang ada di Sudan (Adam Hessainn Yagoob, 2015). Jika mengingat sedikit pada sub bab sebelumnya adanya kunjungan yang kunjungan kenegaraan oleh Salva Kiir ke Tiongkok pada Juli 2007 di mana ia membahas tentang politik, yaitu posisi politik resmi negara dalam pemerintah persatuan nasional Sudan [MOU12] (Xu, 2017)

Fakta tersebut menandakan bahwa besarnya pengaruh Tiongkok terhadap perpolitikan Sudan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Dan dapat dikatakan bahwa adanya kerja sama berkelanjutan yang dilakukan Tiongkok dan Sudan. Sebelumnya kunjungan yang dilakukan oleh Salva Kiir ke Tiongkok membahas penuh tentang sektor ekonomi dan pada 2006 kerja sama yang dilakukan meluas ke sektor politik (Ofodile, 2009).

Sudan dalam hal ini menjadi penerima akibat dari pengaruh besar yang diberikan oleh Tiongkok. Seakan tidak bisa menolak, Sudan dengan kemampuan berdiplomasi yang kurang menerima masukan yang diberikan oleh Tiongkok, dan kurang percaya dengan negara lain yang pernah masuk ke Sudan contohnya Amerika Serikat (Setiawan, 2014). [MOU13] Ditambah konflik yang terjadi melanggar hak asasi manusia, banyak negara-negara Barat enggan menjalin kerja sama dengan Sudan.

Dependensi lebih menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili "suara negara-negara pinggiran" untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya dan intelektual dari negara maju (Rahmayeni, 2014).

Ketergantungan jelas di konsep ini. Adanya ketergantungan yang dilakukan oleh para aktor negara memperlihatkan bagaimana dinamika yang muncul dalam kerja sama yang dilakukan (Rahmayeni, 2014).

Tiongkok melihat hal tersebut cocok untuk meningkatkan kemajuan negara Sudan. Karena Sudan termasuk negara dengan golongan pinggiran, sedangkan Tiongkok mempunyai *power* yang setara dengan negara hegemoni lain seperti Amerika Serikat. Upaya yang dilakukan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur Sudan sudah sangat baik, akan tetapi muncul masalah lain ketika Tiongkok melanggar perjanjian perdagangan senjata. Bermula pada ekspor senjata utama dari Tiongkok mengalami peningkatan sebesar 143% pada tahun 2005-2009 dan 2010-2014, sudah sempat dibahas pada bab sebelumnya Sudan menjadi salah satu penerima bantuan senjata yang lumayan besar dari Tiongkok. Karena adanya peningkatan yang besar pasar ekspor Tiongkok naik yang awalnya 3% naik menjadi 5%. Dari data *Comtrade* PBB, Tiongkok menjadi salah satu penyuplai terbesar ketiga di tahun 2010-2014 (Magland, 2008).

Pada variable terakhir pada teori interdependensi kompleks *military force is not used by governments toward other governments within the region, or on the issues, when complex interdependence prevails*. dalam teori interdependensi kompleks kekuatan militer bukanlah instrumen yang signifikan, karena pola kompleksitas yang terjadi membuat penggunaan kekuatan militer menjadi tidak efektif dalam berbagai isu, sehingga kebutuhan negara terhadap penggunaan militer semakin berkurang. Sehingga negara-negara sekarang lebih dominan membahas

pada sektor ekonomi, politik, lingkungan dan lainnya untuk pembangunan negara (Nye, 1997).

Akan tetapi pada kasus yang terjadi antara Tiongkok dan Sudan adanya ketergantungan Tiongkok dan Sudan yang sangat kompleks pada kerja samanya, kekuatan militer masih dianggap efektif karena kondisi yang ada di Sudan mengharuskan adanya kekuatan militer yang besar untuk bisa menstabilkan Kawasan Darfur. Kekuatan militer ini disokong dari Tiongkok yang memiliki pengaruh besar hampir menandingi Amerika. Tiongkok banyak mengirimkan bantuan senjata ke kawasan Sudan sebagai kesepakatan dari kerja sama keduanya.

Tiongkok telah mengekspor senjatanya kepada 34 negara yang ada di dunia, seperti senjata kecil, senjata ringan, dan amunisi senilai hampir USD 70 juta, dan untuk Sudan sendiri antara tahun 1992-2005, 96% dari senjata Sudan, berasal dari Tiongkok. Sejak 1990-an, Tiongkok telah menjadi salah satu pemasok global utama dari peralatan militer dan senjata ke Sudan (Simanjuntak, 2016).

Persenjataan yang ada di Sudan yang dikirim oleh Tiongkok adalah *small and light weapon*, atau senjata kecil dan ringan. data yang dihimpun dari *UN Comtrade* menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok mengekspor *small arms and light weapon* dan beberapa jenis senjata lainnya menuju Sudan dalam jumlah yang sangat besar. Tiongkok mengekspor dalam skala besar, dan berbagai jenis senjata ke Sudan, data 225 pada *UN Comtrade* menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dan 2012, Tiongkok mengekspor senjata ke Sudan dengan nilai mencapai USD 4 juta dan mencapai seratus ribu jumlahnya. Pada tahun 2011 Tiongkok mengekspor berbagai jenis senjata dari amunisi, *spare*

part pesawat terbang, dan yang paling besar adalah *small arms and light weapon* (Hartung, 2008).

Perdagangan senjata adalah kegiatan yang sangat sensitif dan sarat politik. Perdagangan senjata sangat mempengaruhi keamanan suatu negara. Oleh karena itu, adanya peraturan dalam jual beli senjata dan adanya norma internasional yang mengatur dan menjadi pedoman bagi negara-negara produsen senjata. Adanya norma tersebut bertujuan untuk mencegah senjata terakumulasi di daerah dimana senjata ini menjadi penyebab dari munculnya sebuah konflik dan efek membahayakan lainnya. Hal utama dari norma ini adalah bahwa negara-negara yang mengekspor senjata harus menerapkan dan menegakkan peraturan yang memadai dalam mengontrol transfer senjata mereka. Ada harapan di masyarakat internasional untuk negara produsen senjata akan mengatur dan menegakkan persyaratan yang membatasi transfer senjata ke daerah konflik dan/atau pelanggaran hak asasi manusia (Woolcott, 2014). Perizinan Tiongkok terhadap ekspor senjatanya dianggap tidak memenuhi standar perizinan internasional. Peraturan ekspor Tiongkok ditemukan dalam peraturan dari *People's Republic of China (PRC)* Administrasi Ekspor Senjata (Simanjuntak, 2016).[CJ14]

Di bab sebelumnya sempat menyinggung tentang pada pasal 4 secara eksplisit. Pasal 4 dalam perjanjian senjata menegaskan bahwa, negara memiliki kontrol atas pengelolaan ekspor senjata, kekuatan untuk mencegah pengiriman yang akan merusak keamanan, dan tanggung jawab untuk memastikan praktek ekspor sesuai hukum. Akan tetapi disini Tiongkok melanggar peraturan dan syarat yang ada. Tiongkok tidak memenuhi standar yang diberikan dan tidak melengkapi

syarat untuk melakukan ekspor senjata ke negara lain. Dalam sebuah kegiatan jual beli senjata, disyaratkan bahwa negara produsen senjata harus mampu dalam mengontrol pengiriman setelah meninggalkan perbatasan mereka melalui pengaturan regulasi ekspor yang ketat (Woolcott, 2014).

Mengapa Tiongkok dianggap tidak memenuhi standar ini karena Tiongkok tidak bertanggung jawab atas penjualan senjata mereka setelah meninggalkan pelabuhan mereka, terbukti dengan ditemukannya senjatanya di tangan orang yang tidak seharusnya. Selain itu, kebiasaan internasional mensyaratkan bahwa negara pengeksport mencegah senjata dari yang dikirim ke daerah yang dirasa memiliki ketidakstabilan nasional dan melanggar hak asasi manusia. Tiongkok malah mengeksport setidaknya 96% persenjataannya ke Sudan yang kita ketahui merupakan negara yang belum stabil dan masih terjadi konflik sipil disana. Selain itu adanya pasokan senjata besar-besaran yang dikirim Tiongkok ke Sudan malah memperburuk kondisi yang ada di Sudan (LeBrun, 2014).

Ketergantungan yang mereka rasakan berdampak juga di dunia internasional, mengapa pada penelitian ini Tiongkok dianggap malah memperburuk kondisi yang ada di Sudan, karena akibat banyaknya pasokan senjata yang diterima oleh Sudan mengakibatkan korban jiwa banyak berjatuh akibat penggunaan senjata yang ada. Hal ini jelas telah melanggar hak asasi manusia. Walaupun tidak dipungkiri banyaknya bantuan yang diberikan Tiongkok dan Sudan sangatlah banyak. Akan tetapi pelanggaran Tiongkok terhadap pemberian senjata pada negara yang berpotensi perang ataupun sedang mengalami perang tidak bisa dibenarkan pembahasan tentang bagaimana peran Tiongkok untuk mendamaikan konflik yang

terjadi di Sudan juga tidak terlaksana, adanya janji yang dibuat oleh Tiongkok untuk melakukan perdamaian yang ada di Sudan dijadikan sebagai siasat agi Tiongkok untuk mengambil sumber daya yang ada di Sudan. (Pan Mohammad Faiz, 2007)

Dapat disimpulkan dari teori interdependensi ini adanya aktor dan adanya ketergantungan saling berkaitan satu sama lain. Aktor berperan penting untuk dalam melangsungkan kerja sama dan melakukan kunjungan dengan mengirimkan perwakilan negaranya, membahas bagaimana kerjasama sama yang akan dibuat, bagaimana kedua negara ini dapat dengan nyaman melakuakan kerja sama dan bagaimana kedua aktor penting ini saling mendapatkan keinginan yang harus dicapai. Kerja sama yang dilakukan keduanya memiliki progres yang baik di awal kerja samanya. Kerja sama yang dilakukan mengalami kemajuan yang sangat signifikan, bermula pada kerja sama ekonomi kemudian merambat pada sektor lain seperti politik dan militer. Tiongkok dan Sudan bisa memposisikan negaranya agar mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan di negaranya.

Adanya ketiga variable yang ada di teori interdependensi kompleks menurut Robert O, Keohane dan Joseph S. Nye, Jr membawa ketergantungan yang sangat kompleks yang terjadi antara Tiongkok dan Sudan, kemudian adanya masalah domestic yang terjadi antara kedua belah pihak membuat Tiongkok dan Sudan menjalin kerja sama dan adanya kerja smaa tersebut menimbulkan hubungan timbal balik antar keduanya. Keduanya sama-sama bertukar ha yang tidak dimiliki oleh masing-masing negara untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

ketergantungan jelas dan menjadi poin utama dalam teori interdependensi. Ketika sebuah media (Tiongkok-Sudan) saling melakukan hal untuk mencoba

memenuhi kebutuhan yang diinginkan, ketergantungan akan menjadi sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Tiongkok sangat bergantung dengan Sudan karena Tiongkok mengalami kelangkaan energi di negaranya dan mengharuskan Tiongkok mencari sumber energi baru untuk memenuhi keberlangsungan industri yang ada di Tiongkok. Sedangkan Sudan, negara yang baru berkembang dan mengalami konflik sangat membutuhkan bantuan dari negara lain berupa pembanguann infrastruktur dan pasokan senjata.

Akan tetapi kerja sama yang dilakukan keduanya mengalami dinamika yang naik turun, tidak selalu lancar dan mulus. Banyak masalah yang terjadi ketika kerja sama ini dilakukan. Seperti banyaknya kecaman dari negara luar yang menganggap Sudan melanggar hak asasi manusia, sedangkan Tiongkok melanggar perjanjian dagang senjata. Padahal telah jelas pada perjanjian perdagangan senjata bahwa tidak boleh memberikan senjata kepada negara yang berpotensi terjadi konflik dan menimbulkan masalah di suatu daerah yang diberi senjata. Akan tetapi terlepas hal itu, kerja sama yang dilakukan keduanya membuktikan bahwa faktor yang ada bisa menjawab mengapa Tiongkok dan Sudan saling mengalami ketergantungan satu sama lain.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori interdependensi kompleks, ketergantungan dapat membuat sebuah negara menjalin kerja sama. Adanya faktor yang ada membuat Tiongkok dan Sudan kemudian saling bergantung satu sama lain. Terdapat dua poin penting dari teori interdependensi yaitu adanya peran aktor untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara dengan membentuk kerja sama, tidak ditentukannya isu tertentu didalam kerja sama yang dilakukan oleh para aktor negara. karena masing-masing negara menentukan dan menyesuaikan isu yang terjadi di negara tersebut, yang terakhir kekuatan militer tidak cocok lagi digunakan di era seperti sekarang. Akan tetapi pada kasus Tiongkok dan Sudan kekuatan militer masih bisa berperan efektif dalam mengimbangi kondisi Sudan yang sedang berkonflik.

Aktor berperan penting dalam kerja sama yang berfungsi sebagai pengambilan keputusan dari masing-masing negara dan juga aktor disini berfungsi untuk membuka jaringan yang lebih luas untuk melakukan kerja sama antar negara. Dalam hal ini Tiongkok sebagai aktor negara mencoba menjalin kerja sama dengan Sudan dengan memberikan bantuan-bantuan secara finansial. Ajakan kerja sama yang ditawarkan oleh Tiongkok disambut dengan baik oleh pihak Sudan. Sudan dengan kondisi negara yang memerlukan bantuan sangat menerima kedatangan Tiongkok. Kemudian kerja Tiongkok dan Sudan bisa dilihat dari latar belakang dari masing-masing negara, Tiongkok yang hampir kehabisan sumber energi minyak untuk mendukung industri yang ada di negaranya dan Tiongkok berupaya mencari

sumber energi ke negara lain, sedangkan Sudan dengan kondisi negaranya yang miskin dan sedang berkonflik membutuhkan bantuan dari negara lain untuk membantu perekonomian negaranya.

Adanya latar belakang tadi mengakibatkan adanya faktor ketergantungan antara Tiongkok dan Sudan. Tiongkok banyak mengirimkan bantuan-bantuan berupa pinjaman uang ke Sudan kemudian membantu memperbaiki infrastruktur negara Sudan dan menjadi negara penyokong yang memberikan bantuan senjata sebanyak 96% kepada Sudan. Hal ini bukan tanpa alasan, Tiongkok melihat banyaknya peluang bahwa Sudan memiliki kilang minyak yang cukup besar untuk dimanfaatkan. Kerja sama yang dilakukan mengalami dinamika yang naik turun, akan tetapi dapat diatasi oleh keduanya. Tiongkok dalam kerja sama ini dianggap tidak bertanggung jawab di mata masyarakat internasional karena memperburuk keadaan yang terjadi di Sudan.

Penelitian ini juga tidak luput dari kekurangan dalam penelitiannya, kekurangan dari penelitian ini terletak pada Tiongkok tidak memberikan solusi atas apa yang dia lakukan di Sudan, padahal konflik yang terjadi di Sudan sebelum Tiongkok masuk sudah banyak merenggut korban jiwa, ditambah Tiongkok yang memberikan bantuan senjata besar-besaran mengakibatkan Sudan semakin mengalami keterpurukan akibat konflik yang terjadi, seharusnya yang dilakukan oleh Tiongkok membantu memperbaiki konflik yang ada sesuai dengan janjinya pada awal kerja sama yang akan dilakukan dengan Sudan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Tiongkok lebih mementingkan kepentingannya dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan lebih dari konflik yang terjadi. Saran penulis untuk

penelitian yang serupa dengan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Tiongkok mencari solusi dari kekacauan yang dia lakukan dalam konflik Sudan. Kemudian, menjelaskan lagi lebih rinci pelanggaran apa saja yang dilakukan Tiongkok di Sudan, agar lebih mudah untuk penulis selanjutnya untuk mencari gambaran dari solusi yang dilakukan oleh Tiongkok.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam Hessainn Yagoob, H. O. (2015). Evaluation of Foreign Aid From China on Sudan's Economic Development Process.
- Andhony, H. A. (2018). Efektivitas Peacekeeping oleh United Nations-African Union Hybrid Operation Mission In Darfur (UNAMID) pada Konflik di Sudan Tahun 2007-2010.
- Atree, L. (2012). China Conflict-Affected State - Between Principle and Pragmatism .
- Ayu, A. P. (2019). Strategi China Dalam Mengamankan Suplai Energi Di Kawasan Afrika Tahun 2000-2010.
- Coal, C. (2014). China's Coal Market : Can Beijing Tame King Coal .
- Esa, T. A. (2017). Kepentingan Tiongkok Memberi Pinjaman Luar Negeri Kepada Venezuela Tahun 2010-2016.
- Faruk, G. S. (2008). The Forum on China-Africa Cooperation - A Strategic Opportunity .
- Francis, P. M. (2012). China and the Sudan-South Sudan Oil Free Impasse Implications of Chinese Foreign Aid, Diplomacy, and Military.
- Gould, D. L. (2019). China's Non-Intervention in Sudan and South Sudan .
- Hale, B. A. (2013). Arrighi on Sino-Sudanese Relations : Trade, Investment and Diplomacy in the Twenty-First Century.
- Hartung, W. D. (2008, August 19). Deadly Traffic : China's Arms Trade With The Sudan .
- Huang, C.-H. (2007). U.S China Relations and Dafur.
- Hui, L. (2015). Sino-Sudan relation: Mutually beneficial or neo colonialism. African Journal of Political Science and International Relations.
- Hurst, C. (2008, July 28). China and Sudan - A Well-Oiled Relationship .
- Lahr, H. Z. (2018). Households Energy Consumption Change in China : A Multi-Regional Perspective .
- Lahr, H. Z. (2018). Households' Energy Consumption Change in China : A Multi-Regional Perspective .
- Large, D. (2009). China's Sudan Engagement: Changing Northern and Southern Political Trajectories in Peace and War.
- Larry Hanauer, L. J. (2014). *Chinese Engagement in Africa*. United state : RAND Corporation .

- LeBrun, J. L. (2014). *Following the Tread : Arms and Ammunition Tracing in Sudan and South Sudan*.
- Liao, X. (2013). *China's Energy Diplomacy and Its "Peace Rise" Ambition : The Cases of Sudan and Iran* .
- Magland, N. E. (2008). *Scoping Study on Chinese Relations with Sudan* .
- Minchah, N. (2016). *Kepentingan Tiongkok Pada Konflik Heglig di Sudan Periode 2011-2014*.
- Nasution, P. D. (2019). *Motif Bantuan Luar Negeri Tiongkok ke Sudan Pasca Merdeka (2011-2014)*. *Hubungan Internasional*, 2.
- Nye, R. O. (1997). *Power and Interdependence revisited* .
- Ofodile, D. U. (2009). *Trade, Aid and Human Right : China's Africa Policy in Perspective* .
- Okeke, C. N. (2009). *The Second Scramble for Africa's Oil and Mineral Resources: Blessing or Curse*.
- Pan Mohammad Faiz, S. M. (2007, Februari 27). *Sifat Dasar dan Pengertian Menenai Perbandingan Hukum* .
- Putri, E. F. (2019). *Intervensi Pihak Ketiga : Strategi Tiongkok Dalam Kasus Sudan*. 2-4.
- Rahmayeni, I. (2014). *Kebijakan China Melakukan Kerjasama Energi Minyak Dengan Sudan (2009-2012)*.
- Robert O Kohane, J. S. (1970). *Powers and Interdependance: Word Politics in Transitions* .
- Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, J. (1989). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, third edition.
- Safitri, D. F. (2015, September 28). *Aktor dalam Hubungan Internasional dan Perannya*.
- Setiawan, F. A. (2014). *Memahami Investasi Berbasis Minyak Cina di Sudan: Analisis InteraksiI Strategis Cina Pada Situasi Konflik*.
- Simanjuntak, V. N. (2016). *Investing In Tragedy: Implikasi Suplai Senjata China Terhadap SituasiI PascaKonflik Sudan, 2011-2014*.
- Sugiono. (2016). *Defini Data Ssekunder* .
- Suliman, K. M. (2008). *Collaboratative Research Project on The Impact of China-Africa Relations*.
- Wahidmurni, D. (2017). *Definisi Penelitian* .
- Woolcott, P. (2014). *The Arms Trade Treaty* .

Xinhua. (2017). China, Sudan provide model for South-South cooperation.

Xu, H. (2017). China's Influence in South Sudan: Prospects and Challenges.

Zhidong Li, K. I. (2013). Energy Demand and Supply Outlook in China for 2030 and A Northeast Asian Energy Community - The automobile strategy and nuclear power strategy of China .

